

Wali Kota Bandung Sebut Siswa SD Turut Terpapar Radikalisme

written by Ahmad Fairozi

Harakatuna.com. Bandung-Wali Kota [Bandung](#) Oded M Danial menyebut ada sekitar 600 pelajar termasuk selevel siswa SD dan SMP di Kota Bandung, Jawa Barat yang diduga terpapar paham [radikalisme](#). Dia mengklaim jumlah itu diperoleh dari data milik kepolisian.

Oded tak merinci data tersebut. Dia hanya mengatakan ada siswa SD yang juga sudah terpapar paham radikal. “Ada 600 anak. Ada SMP, bahkan katanya siswa SD juga, di Kota Bandung,” kata Oded di Pendopo Kota Bandung, mengutip Antara, Selasa (29/10).

Oded mengatakan data yang dia peroleh dari kepolisian juga tak lepas dari aksi-aksi unjuk rasa berujung bentrok yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia mengatakan itu memiliki kaitan. Oded lantas mengimbau orang tua, guru, dan kepala sekolah di Kota Bandung untuk meningkatkan pengawasan. Menurutnya itu perlu dilakukan demi mencegah para pelajar terpapar paham radikal.

Dia juga mengatakan Pemkot Bandung akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian, Komando Distrik Milier serta pemangku kepentingan lain yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kerja sama dilakukan dalam rangka menangkal penyebaran radikalisme. “Terutama kepada orang tua dan para kepala sekolah dan guru jangan sampai anak-anak itu jadi korban,” kata dia.

Usaha Pemerintah Rangani Radikalisme Hingga Level Siswa SD

Tak hanya di level Kota Bandung, pemerintah pusat juga kerap kali mengatakan soal bahaya radikalisme. Gerakan Pemuda Ansor menilai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin serius ingin berupaya menangkal radikalisme dalam pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, pemberian tugas khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Politik

Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperlihatkan bahwa pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan serius ingin mengatasi perkembangan radikalisme di Indonesia.

“Ini terlihat dengan ditugaskannya secara khusus Menko Polhukam, Menhan, Mendagri dan Menag untuk ikut menangani masalah radikalisme di masyarakat, khususnya di lingkup kementerian masing-masing,” kata sosok yang akrab disapa Gus Yaquut itu lewat keterangan tertulis, Jumat (25/10).

GP Ansor, lanjut Yaquut, akan merespons keseriusan pemerintah menghadapi radikalisme dengan menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) dalam waktu dekat. Rakornas akan diisi dengan konsolidasi, penguatan kaderisasi, dan kemandirian organisasi. “Saya meminta kini saatnya kembali melakukan konsolidasi, kaderisasi, dan mempercepat kemandirian organisasi,” ucap dia.